

Andalas Journal of International Studies



Toni Dian Effendi

Review of Sister Province Between East Java Province-Indonesia and Prefecture Osaka-Japan

Putiviola Elian Nasir

Dominasi Maskulinitas dalam Militer: Analisis Konstruksi Budaya terhadap Gender dalam Militer Melalui Perang

Virtuous Setyaka dan Febrina Mulya

Masyarakat Sipil Transnasional dan Demokratisasi di Indonesia

Iwan Sulistyو

Kebijakan Pertahanan Indonesia 1998-2010 dalam Merespon Dinamika Lingkungan Strategis di Asia Tenggara

Cici Anisa Fimaliza

Strategi Organisasi Perempuan Anti-Trafficking Apne Aap Dalam Penanggulangan Isu Perdagangan Manusia di India

Andalas Journal of
International
Studies

Volume 3

No. 2

Halaman
101-207

Padang
Nov 2014

ISSN
2301-8208



**Andalas Institute of International Studies
International Relations Department
Faculty of Social and Political Sciences
Andalas University**

Andalas Journal of International Studies

ISSN: 2301 - 8208

Published by
Andalas Institute of International Studies – ASSIST
International Relations Department
Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Andalas
Padang

Editor in Chief : Haiyyu Darman Moenir
Editorial Board : Ranny Emilia, Apriwan
Associate Editors : Virtuous Setyaka, Putiviola Elia Nasir, Sofia Trisni
Design/lay out : Trio Sirmareza/Ardila Putri
Editorial Advisory Board : Assoc. Prof. Denise M. Horn (Northeastern University)
Dr. Sukawarsini Djelantik (Universitas Khatolik Parahyangan)
Philip Vermonte (CSIS Jakarta)
Edwin Tambunan (Universitas Pelita Harapan)
Widya Setiabudi (Universitas Padjajaran)
Editorial Office : Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Gedung Jurusan – FISIP Universitas Andalas, Lt. 2
Kampus Limau Manis, Padang, 25163
Telp/fax: (0751)71266
Homepage : <http://ajis.fisip.unand.ac.id/>

Andalas Journal of International Studies (AJIS) is published twice a year. It is published by ASSIST, contains research and analytical platform dedicated to a better understanding of International issues and aims to craft the alternatives in International Studies. AJIS welcomes for papers which never been published. Submit your paper to our editorial office in conditional, type in A4, consist of 4000-5000 words in *Turabian Style* formatting.

Andalas Journal of International Studies

Volume 3, No. 2, November 2014

ISSN 2301–8208

Review of Sister Province Between East Java Province-Indonesia and Prefecture Osaka-Japan	101
Toni Dian Effendi	
Dominasi Maskulinitas dalam Militer: Analisis Konstruksi Budaya terhadap Gender dalam Militer melalui Film Perang	126
Putiviola Elian Nasir	
Masyarakat Sipil Transnasional dan Demokratisasi di Indonesia	148
Virtuous Setyaka dan Febrina Mulya	
Kebijakan Pertahanan Indonesia 1998-2010 dalam Merespon Dinamika Lingkungan Strategis di Asia Tenggara	165
Iwan Sulistyio	
Strategi Organisasi Perempuan Anti <i>Trafficking</i> Apne Aap dalam Penanggulangan Isu Perdagangan Manusia di India	192
Cici Anisa Firmaliza	

Preface

By mentioning the presence of the name of Allah SWT, Andalas Journal of International Studies (AJIS) is very excited to published Volume 3 No. 2 in 2014. AJIS is a journal that discusses issues related under the umbrella of International Studies with kind of topics ranging from International relations, International education, International politics, International ethics, among so many other emerging issues in today's world.

As our aim in publishing this journal is to disseminate the results of all International Studies scholars, practitioners, lecturers, and researcher works with various topics and approaches in order to contribute to the development of International Studies both theoretically and practically.

Entering second edition in Volume 3, we express our gratitude to the authors who have been willing to submit papers whether it is the result of research, personal thoughts, as well as the contribution of the thesis students from the Department of International Relations.

In this edition, there are 2 papers presents a title relating to securitization issues, especially in the field of militaristic. Masculin dominancy in military: analysis of cultural construction toward gender in military through war film, written by Putiviola Elian Nasir. Iwan Sulistyio by lifting the theme the response of Indonesia in an effort to counterbalance the development of military power in Southeast Asia during the 1998-2010 period.

In the next paper, Virtuous Setyaka in collaboration with Febrina Mulya elaborated transnational civil society and democratization in Indonesia. Toni Dian Effendi entitled by the Review of Sister Province between East Java Province-Indonesia and Prefecture Osaka-Japan. And the last, written by Cici Anisa Firmaliza with title strategy and effort undertaken by an anti-trafficking NGO called Apne Aap on addressing human trafficking issue in India

With the biggest gratitude, we would also like to thank the editorial board, who has worked hard in the preparation of these papers, so in the end it can come up to be a printed journal.

Editorial Team

Masyarakat Sipil Transnasional dan Demokratisasi di Indonesia

Virtuous Setyaka¹ dan Febryna Mulya²

Forum Studi Indonesia untuk Demokrasi dan Transnasionalisme (INDERA)

Abstract

Demokrasi dan Masyarakat Sipil secara teoritik maupun praktik menjadi konsep-konsep yang populer di Dunia. Sedangkan Transnasional(isme) menjadi populer ketika hubungan internasional secara teoritik maupun praktik mengakomodasinya seiring kesadaran para akademisi dan praktisi tentang fenomena semakin kaburnya batas teritorial secara fisik maupun non-fisik negara bangsa yang juga populer dengan sebutan globalisasi. Indonesia adalah salah satu negara bangsa yang dikenal dengan penerapan demokrasi dalam sistem politik dan pemerintahannya bahkan klaim tersebut dilakukan sejak kemerdekaan dan pembentukannya. Dalam demokrasi di Indonesia, keberadaan dan peran masyarakat sipil juga diakui bukan saja sebagai syarat dan penanda terjadinya demokratisasi. Lebih dari itu juga berperan secara aktif untuk percepatan dalam mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Makalah ini menganalisis tentang pencapaian demokrasi di Indonesia, masyarakat sipil transnasional Indonesia; dan mengajukan gagasan tentang memajukan demokrasi di Indonesia. Dengan mengoperasionalkan teori dan konsep defisit demokrasi, demokrasi transnasional, masyarakat sipil transnasional, analisis dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep dan teori-teori tersebut secara kritis dan pendekatan kualitatif kritis untuk memahami pencapaian demokrasi, posisi dan peran masyarakat sipil transnasional dalam demokratisasi di Indonesia. Selain itu juga menggunakan unit analisis masyarakat sipil dengan level analisis global, dan dengan fokus pada kasus demokratisasi di Indonesia sebagai konteks analisis.

Keywords: *defisit demokrasi, demokrasi transnasional, masyarakat sipil transnasional, Indonesia*

¹ Dosen pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Andalas, Padang.

² Mahasiswa pada Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta.

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem politik pertama yang dipilih Indonesia sebagai jalan membangun negara. Hal ini termuat dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia sejak merdeka mencanangkan demokrasi yang cenderung demokrasi-sosialisme. Demokrasi sosialisme Indonesia dikenal dengan Demokrasi Pancasila yaitu paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia dengan perwujudan seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Dasar Demokrasi Pancasila adalah Kedaulatan Rakyat (Pembukaan UUD 45) dan Negara Berkedaulatan (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.²⁹ Maknanya, partisipasi rakyat dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara ditentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam implementasinya, cara berdemokrasi di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan selalu mengalami revisi, namun selalu tidak substansial. Berkutat pada proses-proses kekuasaan dan terjebak dalam demokrasi prosedural. Kualitas demokrasi di Indonesia tidak kunjung memudahkan aktualisasi warga negara (*citizen*) pada proses

partisipasi politik yang proporsional: dalam pemilihan umum maupun terlibat dalam proses pembuatan keputusan dan regulasi kebijakan sosial-politik. Dengan demikian, banyak wacana baru muncul terkait demokrasi deliberatif. Demokrasi harus mengupayakan tatanan sosial politik sesuai dengan kebutuhan orang-orang (*people*) sebagai masyarakat (*society*) dan sebagai warga negara (*citizen*) dalam berpartisipasi sesuai konteks atau nilai dasar demokrasi: kebebasan individu, kesetaraan bagi semua orang, dan keadilan sosial.³⁰

Perjalanan demokrasi di Indonesia yang merupakan negara multikultural, demokratisasi merupakan tantangan sekaligus peluang Indonesia menuju tujuan awalnya yang tertuang di UUD 1945 sebagai negara kesejahteraan. Demokrasi dewasa ini juga harus bersifat transnasional. Demokratisasi tidak lagi hanya terjadi secara internal, namun juga bisa berasal dari eksternal. Hal itu merupakan konsekuensi dari apa yang disebut dengan globalisasi dan transnasionalisme. Artinya, demokratisasi adalah

²⁹ Kitab Amandemen UUD 1945.

³⁰ Bandingkan dengan Gray yang menyatakan nilai dasar demokrasi adalah partisipasi, kebebasan dan kesetaraan, ketertarikan pada kebaikan bersama, dan keinginan untuk melakukan *voting* (terlibat dalam pembuatan keputusan). Lihat David Emanuel Gray (2005), *Sosial Choice in Deliberative Democracy*, Tesis pada Departemen of Philosophy, Carnegia Mellon University. H. 46.

sebuah proses berkesinambungan antara faktor internal (dalam negeri) dan eksternal (luar negeri).

Dalam artikel ini akan dikaji tentang **Masyarakat Sipil Transnasional dan Demokratisasi di Indonesia** dengan diawali mengkaji defisit demokrasi global dan di Indonesia, kemudian merumuskan gelombang demokratisasi Abad ke-21 dengan membahas keberadaan masyarakat sipil transnasional dan demokrasi transnasional, dan ditutup dengan dinamika masyarakat sipil transnasional dan masa depan demokrasi Indonesia.

METODOLOGI ANALISIS

Makalah ini menganalisis tentang pencapaian demokrasi di Indonesia, masyarakat sipil transnasional Indonesia; dan mengajukan gagasan tentang memajukan demokrasi di Indonesia. Dengan mengoperasionalkan teori dan konsep: Defisit Demokrasi, Demokrasi Transnasional, dan Masyarakat Sipil Transnasional. Analisis dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep dan teori-teori tersebut secara kritis dan pendekatan kualitatif kritis untuk mengukur pencapaian demokrasi, posisi dan peran masyarakat sipil transnasional dalam demokratisasi di Indonesia.

Selain itu juga menggunakan unit analisis masyarakat sipil dengan level analisis global, dan dengan fokus pada kasus demokratisasi di Indonesia sebagai konteks analisis. Sehingga, diharapkan mampu menemukan model baru demokratisasi untuk memajukan demokrasi dan perwujudan Indonesia baru.

Dalam penulisan makalah ini, digunakan kajian literatur. Persoalan didalami dengan data-data yang diperoleh dari berbagai literatur khususnya terkait dengan demokrasi deliberatif dan demokrasi sosial, serta jurnal-jurnal dari penelitian-penelitian terkait perkembangan demokrasi di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Defisit Demokrasi Global dan Kasus Indonesia

Dalam sebuah buku berjudul *Transnational Democracy* yang dieditori oleh James Anderson³¹, diulas tentang berbagai fenomena yang menarik untuk diperhatikan, di antaranya adalah meningkatnya penyeberangan perbatasan (negara), terganggunya (*disrupted*) ruang politik lama, diciptakannya ruang-ruang (kehidupan

³¹ James Anderson (2002), *Transnational Democracy, Political Spaces and Border Crossings*, New York: Routledge, 1.

sosial) baru, dan terjadinya 'defisit demokrasi' secara umum atau global. Berbagai karakter dan bentuk perubahan global telah mengancam berbagai karakter dan bentuk representasi demokratis dan akuntabilitas konvensional. Itu semua berdampak pada terbukanya peluang kebutuhan baru dan kemungkinan demokratisasi di luar wilayah negara secara nasional. Hal itu berlanjut dengan munculnya berbagai pertanyaan-pertanyaan yang menantang tentang masa depan demokrasi nasional dan kebutuhan untuk bentuk-bentuk baru demokrasi di arena transnasional. Pada Abad ke-21 ini, semuanya itu masih mendorong diperlukannya agenda-agenda politik oleh berbagai gerakan 'anti-globalisasi' atau 'anti-kapitalisme' yang lebih luas dan besar karena globalisasi kapitalistik yang terangkum dalam neoliberalisme masih dominan. Semua fenomena itu berada dalam rentang spektrum isu-isu dari yang berskala lokal hingga global. Vertovec (1999) dan Pries (2001) menyatakan pentingnya untuk mempertimbangkan kembali kekuatan epistemologis dan nilai atas konsep-konsep nasionalisme, transnasionalisme dan globalisasi.³² Hal tersebut pantas

dipertimbangkan seiring dengan perkembangan dan perubahan struktur global dunia yang terjadi secara massif dan intensif.

Terjadinya *democratic deficit* di dalam masyarakat sipil adalah sebagaimana kata Alyson Brisk (2000):

“In broader terms, civic democratic deficits include unclear representation, unaccountable leadership, lack of autonomy (from the state, political parties, or international forciers), and lack of respect for universal human rights.”

Dari Brisk dapat dipahami bahwa defisit demokrasi pada masyarakat sipil secara luas adalah termasuk di dalamnya:

1. Ketidakjelasan keterwakilan rakyat dalam politik dan pemerintahan. Ketidakjelasan tersebut di antaranya adalah karena di parlemen, misalnya, para anggota parlemen yang selama ini dipercaya menjadi wakil rakyat ternyata tidak lebih dari wakil partai politik bahkan wakil bagi dirinya sendiri. Hal tersebut saat ini sedang menggejala dan berkembang di Indonesia yang kemudian dipahami secara luas sebagai oligarki.

³² Andreea Lazăr (2011), *Transnational Migration Studie., Reframing Sociological*, Journal of

Comparative Research in Anthropology and Sociology, Volume 2, Number 2, Fall 2011, ISSN 2068 – 0317.

2. Pemerintahan yang tidak akuntabel atau pemerintahan yang tidak bersih. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya kasus korupsi, misalnya; dan Indonesia adalah negara yang saat ini dikenal sebagai salah satu negara korup dengan bukti banyaknya elit politik yang berada di eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif yang terjerat hukum dalam kasus korupsi.

3. Sangat kurangnya otonomi masyarakat sipil ketika dikaitkan dengan negara, partai politik dan penekan-penekn internasional. Masyarakat sipil yang tidak otonom di Indonesia ditandai dengan ketidakmampuan masyarakat untuk melepaskan diri secara optimal jika memang tidak secara sepenuhnya dari ketergantungan terhadap (pemimpin) negara. Artinya kemandirian dan produktivitasnya secara politik khususnya sangat dipengaruhi dan dikuasai oleh elit politik. Dengan kata lain, masyarakat masih dihegemoni bahkan didominasi oleh negara sebagai kelas penguasa yang memperlakukan masyarakat sebagai kelas yang dikuasai. Sedangkan orang-orang sebagai bagian dari masyarakat yang kemudian berpolitik, namun terikat dan terikat dengan partai politik, tidak mampu dan mau sepenuhnya untuk tidak terlalu dipengaruhi oleh partai politik asal mereka ketika mereka berada dalam struktur politik

dan pemerintahan negara. Demikianlah, akhirnya salah satu yang kemudian memperlancar lahir dan munculnya oligarki politik. Sedangkan ketergantungan dari penekan-penekn internasional yang paling mencolok adalah ketergantungan elemen-elemen masyarakat sipil khususnya kepada para pendonor atau pemberi bantuan asing.

4. Kurangnya respek atau tanggungjawab terhadap hak-hak asasi manusia secara universal.

Jalan demokrasi adalah jalan sejak awal dipilih oleh *the Founding Fathers* ketika Indonesia merdeka. Rekam jejaknya termuat pada pembukaan UUD 1945, UUD 1945 dan Pancasila. Sebagai pijakan negara, demokrasi yang diimpikan adalah demokrasi yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah kenapa dikatakan bahwa demokrasi Indonesia adalah Demokrasi Pancasila, karena merupakan demokrasi yang lahir dari nilai-nilai sosio-historis bangsa Indonesia sendiri³³. Demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat merupakan jalan tengah dari melihat perjalanan demokrasi liberalism

³³ Pidato Moh. Hatta pada tahun 1969, sekaligus tertuang dalam buku demokrasi kita karya Moh. Hatta tahun 1966 dan direkam kembali dalam buku Demokrasi untuk Indonesia: pemikiran politik Hatta oleh Zulkifli Suleman tahun 2010.

kapitalisme yang tumbuh di Barat pasca Revolusi Perancis 1789³⁴.

Demokrasi Indonesia memasuki babak baru ketika runtuhnya rezim demokrasi-sentralistik yang dibangun oleh Soeharto pada Mei 1998 melalui Gerakan Reformasi. Namun, demokrasi di Indonesia sejak terjadinya Gerakan Reformasi 1998 sampai saat ini masih berkuat pada demokrasi demokrasi prosedural³⁵. Pekerjaan rumah terbesar setelah 16 tahun demokrasi berjalan, adalah reformasi demokrasi pada tatanan sosial dimasyarakat. Wujud nyata dari tidak terreformasinya tatanan sosial di Indonesia dapat terlihat jelas melalui berbagai konflik, diantaranya antar sub etnis, antar penganut ajaran agama dan sub ajaran agama dan sampai ketatanan perbedaan pilihan politik³⁶.

³⁴ “Demokrasi barat mengalami distorsi menjadi tidak senonoh” Hatta dalam Carol C. Gould. 1993. *Demokrasi Ditinjau Kembali*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 4.

³⁵ Demokrasi prosedural adalah demokrasi yang mengutamakan terbentuknya tata kelola urusan politik, atau sistem dimana rakyat mempunyai peluang untuk menerima dan menolak pemimpin mereka melalui proses pemilu kompetitif. Dalam Joseph Schumpeter (1947), *Capitalism, Socialism, And Democracy*. New York: Harper and Brother. Lihat Robert Dahl dalam Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy vs Vontrol. Yale University Press, 10-11.

³⁶ Boni Hargens, 2006, *Demokrasi Radikal: Memahami Paradoks Demokrasi Modern dalam Perspektif Postmarxis-Postmodernis Ernesto Laclau dan Chantal Moufee*. Yogyakarta: LKiS, 42.

Pengakuan internasional bahwa Indonesia telah menjadi negara demokrasi terbesar ketiga didunia setelah berhasil melakukan Pemilu2004, tetapi pada waktu yang bersamaan jumlah orang miskin di Indonesia menurut versi BPS sebanyak 39,05 juta jiwa pada 2006³⁷. Angka kemiskinan versi BPS menunjukkan peningkatan jumlah orang miskin diIndonesia dari 35,10 juta orang (Februari 2005)menjadi 39,05 juta orang (Maret 2006). Penentuan garis kemiskinan versi BPS berdasarkan pada pola pemenuhan konsumsi minimum 2100 kalori. Bila menggunakan garis kemiskinan internasional berdasarkanPPP (purchasing power parity) US\$2 maka jumlah orang miskin di Indonesia melonjakdrastis menjadi 108 juta orang. Berkaitan dengan kemiskinan,angka kasus busung lapar meningkat dari 1,67 juta anak (2004) menjadi 2,3 juta anak (2006)³⁸.

Untuk memajukan demokrasi di Indonesia kedepannya adalah menuangkan ide-ide demokrasi deliberatif dimulai dari inklusi sosial sampai terwujudnya keadilan sosial. Mengabaikan inklusi sosial dan keadilan sosial sama halnya mengabaikan amanat Demokrasi Pancasila sebagai jalan menuju Indonesia sejahtera atau *welfare state*.

³⁷ Ganda Upaya, Demokrasi dan Gerakan Sosial.

³⁸ Kompas, 16 Desember 2006.

Sehingga pengabaian ini akan melahirkan negara yang tidak berdaulat. Tidak berdaulatnya negara bukanlah karena faktor eksternal, namun justru dari internal karena tidak demokratis atau otoritarian dan kemunculan pemimpin yang cenderung diktator.

Dalam proses deliberasi, individualitas sangat ditekankan. Dalam kondisi budaya bisu (*silence culture*), deliberasi tidak terjadi. Karena dalam proses deliberasi harus ada apa yang disebut kompetensi komunikatif. Setiap individu dalam masyarakat mempunyai kompetensi komunikatif. Tugas dari forum deliberasi adalah membangun kompetensi komunikatif. Caranya, membiarkan mereka menghargai pendapat sendiri, memberikan ruang perbedaan pendapat sehingga mereka menyadari bahwa perbedaan pendapat itu menguntungkan. Karena, dari perbedaan pendapat itu ada cukup banyak perspektif yang dibuka. Dan yang lebih penting untuk *silence culture*, berbeda pendapat itu tidak menakutkan, tetapi memperkaya³⁹.

B. Demokrasi Transnasional dan Imbasnya ke Indonesia

Steven Vertovec dalam karyanya *Transnationalism* (2009) membahas transnasionalisme terutama terkait dengan migrasi dan transformasi yang mampu merubah formasi sosial. Kajiannya membentang isu-isu transformasi sosio-kultur, politik, ekonomi, dan religi. Transnasionalisme sebagai pemikiran dan tindakan sepertinya semakin menegaskan tentang dunia yang saling terhubung ketika para migran juga saling terhubung⁴⁰.

Transnasionalis menciptakan tingkat yang lebih besar dari hubungan antara individu, masyarakat dan masyarakat lintas batas; membawa perubahan dalam lanskap sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat asal dan tujuan. Dengan demikian maka tantangan bagi para pembuat kebijakan di sebuah negara bangsa adalah kemauan dan kemampuan untuk melihat dan memperhatikan melampaui batas-batas negara bangsa mereka dalam menganalisis ruang lingkup, tujuan dan dampak dari kebijakan mereka. Meskipun di sisi lain, koneksi lintas batas antara masyarakat akibat migrasi memerlukan perumusan dan pelaksanaan intervensi kebijakan yang tepat oleh (pemerintah sebuah) negara

³⁹ F. Budi Hardiman, 2008.

⁴⁰ Steven Vertovec (2009), *Transnationalism*, New York: Routledge.

bangsa⁴¹. Transnasionalisme dapat didefinisikan secara umum berpusat pada pertukaran-pertukaran, koneksi-koneksi dan praktik-praktik lintas batas (negara bangsa), sehingga hal tersebut mentransformasikan ruang nasional sebagai titik acuan utama untuk berbagai kegiatan dan identitas manusia.

Sejak John Locke dan J.J. Rousseau memperkenalkan tentang “kontrak sosial”, demokrasi menjadi salah satu jawaban bagi permasalahan dan tantangan dalam sistem politik. Demokrasi memiliki nilai-nilai dasar demokrasi yakni “kesejahteraan sosial dan keadilan sosial”. John Rawls dalam karyanya *The Political Liberalism*, mendeklarasikan bahwa tujuan filsafat politik dalam demokrasi konstitusional adalah mengajukan sebuah konsep politik keadilan yang tidak hanya memberikan dasar kehidupan publik yang fair untuk justifikasi sosial politik dan institusi ekonomi, melainkan juga memastikan adanya stabilitas dari satu generasi ke generasi berikutnya⁴². Bagi Rawls sendiri, kesatuan sosial itu dipastikan oleh

konsensus silang yang didasarkan pada konsep politik yang waras mengenai keadilan⁴³. Namun konsep demokrasi selama ini meletakkan publik pada eksklusifitas dan konsensus koersif sehingga dalam *The Paradoxes Democracy* karya Chantal Mouffe demokrasi idealitas Rawls adalah ilusi bagi publik. Sehingga bagi Mouffe dalam memajukan demokrasi apalagi pada negara pluralisme sangat dibutuhkan inklusi publik dan pembentukan kesatuan sosial. Memajukan demokrasi melalui inklusi sosial dan keadilan sosial bukanlah wacana baru, ilmuwan politik menyebutnya sebagai demokrasi deliberatif.

Teori demokrasi deliberatif menjelaskan level-level proses pembentukan opini, karier opini "dari mana opini dan menuju ke mana" penyaringan komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi, dan lain sebagainya⁴⁴. Jürgen

⁴¹ International Organization for Migration (IOM), Background Paper for International Dialogue On Migration, Intersessional Workshop On Migration And Transnationalism: Opportunities And Challenges, 9 -10 March 2010.

⁴² John Rawls, 1993. *Political liberalism*, New York : Columbia University Press, Lecture V

⁴³ Chantal Mouffe, 2000, *The Democratic Paradox*, Verso Landon : New York hlm. 3-44

⁴⁴ Dalam setiap komunikasi, ada beberapa hal yang berperan. Lebenswelt di antaranya. Lebenswelt (Jerman), lifeworld (Inggris), atau dunia kehidupan adalah latar belakang komunikasi yang diandaikan begitu saja dan sifatnya pra-reflektif, bahkan pra-sadar, tapi nyata-nyata menuntun komunikasi. Tanpa lebenswelt, tidak akan ada komunikasi yang berarti. Diskursus selalu bergerak dalam masyarakat, dan setiap upaya tematisasi akan selalu keluar dari lebenswelt: komunikasi sehari-hari yang taken for granted.

Habermas⁴⁵ menggaris bawahi bahwa sangat mungkin deliberasi politik dan transformasinya kedalam struktur akan membentuk masyarakat yang total. Sebagai pengganti bagi persinggungan antara tujuan deliberasi pada sebuah keputusan dimana diperlukan justifikasi kontekstual. Diatur oleh prosedur demokrasi melalui pembentukan opini publik yang berada dalam pencarian kontekstual (*contextofdiscovery*).

Habermas termasyhur dengan teori diskursus⁴⁶: perbincangan atau wacana sebagai bentuk komunikasi yang reflektif yangmentematisasi sebuah problem tertentu. Dalam teori demokrasi deliberatif, pada sistem politik supaya kanal-kanal komunikasi dibuka, tetapi negarahukum tetap ada, harusada pembedaan antara *state* dan *society*. Tanpa negara, ongkos

politiknya akan sangat besar, terjadi tirani massa dan keuntungan akandiambil oleh para demagog dan provokator. Teori demokrasi deliberatif tidak mengakui revolusi, tetapi reformasi. Revolusi --dan itu selaludengan kekerasan-- tidak membiakkan partisipasi, bahkan mematikan partisipasi.

Dalam teori demokrasi deliberatif terjadi apa yang disebut proseduralisasi kedaulatan rakyat: membuat kedaulatan rakyat sebagai proses komunikasi. Kedaulatan terjadi bukan karena orang berkumpul dengan tubuhnya di suatu tempat, tetapi jugaharus ada komunikasi publik. Dalam konteks ini, demokrasi representatif tetap diperlukan dengan sudut pandang bahwa peranan komunikasi publik itu harus semakin besar. Kedaulatan rakyat sebagai substansi yang berproses nasional, bahkan internasional, yang bergerak terus melalui komunikasi. Ini proseduralisasi dari kedaulatan rakyat menurut Habermas⁴⁷.

Dalam demokrasi deliberatif, negara tidak lagi menentukan hukum dan kebijakan-kebijakan politik lainnya dalam ruang

⁴⁵Seorang pemikir yang pada 60-an dekat dengan gerakan Marxis Kiri dan banyak menginspirasi gerakan mahasiswa tahun 1968.

⁴⁶Beragam tipe diskursus: diskursus teoretis, diskursus praktis (spesifikasinya menurut Habermas adalah diskursus pragmatis⁴⁶, diskursus etis-politis⁴⁶, dan diskursus moral⁴⁶), dan diskursus kritis. Diskursus teoretis adalah percakapan argumentatif menyangkut persoalan-persoalan yang factual, ada upaya untuk mengecek fakta. Diskursus praktis terjadi kalau yang menjadi problem itu adalah norma. Kalau dalam diskursus itu harus ada konsensus, dalam kritik tidak perlu. Kritikus itu memberikan tilikan. Ada dua macam kritik, yaitu kritik estetis dan kritik terapoitis. Kritik terapoitis adalah bentuk pembicaraan yang mengkritik.

⁴⁷ F. Budi Hardiman, 2008, *Demokrasi Deliberatif: Teori, Prinsip, dan Praktik*, Presentasi yang disampaikan dalam Forum Rapat Kerja ke-3 dan Koordinasi Pelaksanaan Deliberative Forum "Program Pemberdayaan Masyarakat Sipil dalam Proses Otonomi Daerah" di Wisma LPP, Yogyakarta, 24 Agustus 2005.

tertutup yang nyaman (*splendid isolation*), tetapi masyarakat sipil melalui media dan organisasi yang vokal memainkan pengaruh yang sangat signifikan dalam proses pembentukan hukum dan kebijakan politik itu. Medan publik menjadi arena di mana perundangan dipersiapkan dan diarahkan secara diskursif. Disinilah titik temu bahwa dalam demokrasi deliberatif sangat diperlukan inklusi sosial serta keadilan sosialitu sendiri. Tentunya, perdebatan konsep-konsep demokrasi deliberatif ini berangkat dari paradigma pemikir tradisi komunitarian yang mempercayai adanya hak kolektif bagi *citizen*.

Memajukan demokrasi haruslah dimulai dari inklusi sosial bukan eksklusi. Hal ini didasari bahwa inklusi adalah upaya membangun dan mengembangkan keterbukaan, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang untuk terlibat dalam bernegara. Inklusi sosial dengan demikian membangun dan mengembangkan keterbukaan dalam relasi sosial.

Setidaknya ada empat prinsip normatif yang selalu hendak ditekankan dalam bangunan demokrasi diskursif atau demokrasi deliberatif ini, yaitu *pertama*, inklusi atau penyertaan (*inclusion*). Dalam demokrasi

diskursif, sebuah keputusan demokratis akan memiliki legitimasi yang kokoh hanya apabila seluruh pihak yang terkena efek atau menjadi dari efek keputusan tersebut dilibatkan dalam proses diskusi dan pembuatan keputusan. Yang dimaksud berefek di sini adalah berbagai keputusan dan kebijakan tersebut mengkondisikan pilihan-pilihan aktor ketika bertindak.

Kedua, kesetaraan atau keadilan (*equity*). Komunitas atau individu yang terkena dampak bukan hanya dilibatkan tapi memiliki kesamaan hak dan kesempatan efektif yang sama untuk mengekspresikan kepentingan dan kehirauan mereka. Mereka juga berhak memiliki kesempatan yang sama untuk mempertanyakan serta mengkritik argumen satu sama lain. Hal ini hanya akan terjadi apabila terjadi kondisi bebas dari adanya dominasi.

Ketiga, kewajaran atau rasional (*reasonableness*). Dalam konteks demokrasi diskursif, istilah "reasonableness" lebih mengacu pada serangkaian karakter yang dimiliki oleh partisipan diskusi dibandingkan pada substansi yang dikontribusikan oleh peserta. Komunitas yang *reasonable* biasanya akan datang dalam diskusi untuk mencari solusi terhadap persoalan. Kalaupun tidak tercapai kesepakatan setidaknya terjadi

proses-proses untuk mencapai kesepakatan tersebut yang sudah terpol.

Keempat, ke-publik-an atau publisitas (*publicity*). Adanya prinsip-prinsip inklusi, kesetaraan, *reasonableness* telah mendorong adanya "publik" yang didalamnya masyarakat saling bertanggung-gugat satu samalain. Sebuah ranah publik merupakan muara dari pluralitas pengalaman sejarah, komitmen, kepentingan dan tujuan baik dari individu maupun kolektif, yang bertemu satu sama lain untuk mendiskusikan masalah kolektif⁴⁸.

Keempat prinsip normatif tersebut selain menjadi syarat dari demokrasi diskursif atau deliberatif, juga dapat dimaknai sebagai jalan yang didalamnya berisi langkah-langkah dari inklusi sosial menuju keadilan sosial. Ditambah dengan realitas kekinian, di mana negara tidak akan mampu lagi menutup diri atau menerapkan praktik isolasionis, maka perlu mempertimbangkan transnasionalitas yang menandai perlu adanya tingkatan analisis empat tingkat, yaitu: lokal, nasional, regional dan global. Dari seluruh rujukan pemikir-pemikir politik diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam memajukan demokrasi di Indonesia adalah melalui upaya demokrasi deliberatif yakni

dimulai dari inklusi sosial sampai pada keadilan sosial. Memadukan konsepsi demokrasi deliberatif dan transnasionalisme dalam menganalisis demokrasi dan demokratisasi di Indonesia dapat diamati melalui skema sederhana yang diolah dari berbagai literature diatas:

Tabel 1
Tingkat Analisis dan Sektor Publik dalam Demokrasi Deliberatif

		Sektor Publik: Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya			
		Inclusi on	Equi ty	Reasonable ness	Publici ty
T i n g k a n t	Lokal/ Daerah				
	Nasion al/ Negara				
	Region al/ Kawas an				
	Global/ Dunia				

C. Masyarakat Sipil Transnasional dan Masa Depan Demokrasi Indonesia

Masyarakat Sipil adalah masyarakat yang terbuka dalam karakter (Guan,2004). Masyarakat sipil adalah perwujudan cita-cita etis tatanan sosial, yang, jika tidak dapat mengatasi, setidaknya menyelaraskan,

⁴⁸ Iris Marion Young. 2004. *Inclusion and Democracy*. Oxford: Oxford University Press, h. 228-229.

tuntutan yang bertentangan dari berbagai kepentingan individu dan sosial dengan baik (Seligman, 1992). Inti dari pemahaman ini adalah proposisi bahwa masyarakat sipil sebagai sebuah benteng modern bagi kebebasan, demokrasi, kerjasama, solidaritas dan keadilan sosial karena memberikan ruang bagi pelaku sosial untuk membawa perubahan sosial dan politik yang positif (Cohen dan Arato, 1992)⁴⁹.

Jika kemudian dipahami secara umum maka masyarakat sipil transnasional adalah para pelaku sosial untuk membawa perubahan sosial dan politik yang positif dalam masyarakatnya melalui proses-proses transnasional. Istilah 'masyarakat sipil transnasional' dan 'masyarakat sipil global' populer digunakan dalam literatur akademik pada politik internasional dimulai sejak periode akhir Perang Dingin⁵⁰. Sebagian besar definisi mengacu pada 'aksi kolektif yang tidak koersif (*uncoerced*) di sekitar berbagai minat, tujuan dan nilai-nilai' yang

bersifat non-pemerintah dan bukan untuk keuntungan⁵¹. Aktor kunci masyarakat sipil transnasional adalah organisasi internasional non-pemerintah (Ornop atau Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM) yang tidak menghasilkan keuntungan atau instrumen pemerintah, serta organisasi non-pemerintah nasional yang berorientasi internasional. Perbedaan sering dibuat antara organisasi non-pemerintah internasional yang ada hanya untuk memberikan layanan kepada anggotanya dan organisasi non-pemerintah internasional berorientasi pada isu, yang merupakan fokus utama dalam studi masyarakat sipil transnasional⁵². Masyarakat sipil transnasional tidak selalu sesuai dengan kemajuan kajian tentangnya secara linier sebanyak literatur yang ada mengasumsikannya. Sebaliknya, ia telah bangkit dan jatuh secara bergelombang selama dua abad terakhir. Kebangkitan dan kejatuhan masyarakat sipil transnasional bahkan mungkin seperti proses siklus: faktor-faktor yang mendorong kebangkitannya seringkali sama dengan orang-orang yang mempromosikan

⁴⁹ Dalam Ben Davis, 2007, *Advocacy NGOs, Transnationalism and Political Space, An Indonesian Case Study*, sebuah Tesis pada Department of Indonesian Studies, The University of Sydney. h. 10.

⁵⁰ Thomas Richard Davies (2008), *The Rise and Fall of Transnational Civil Society: The Evolution of International Non-Governmental Organizations Since 1839, Working Papers on Transnational Politics*, London: City University, Centre for International Politics, h. 2.

⁵¹ Jan Aart Scholte (1999), *Global Civil Society: Changing the World?* Coventry: Centre for the Study of Globalization and Regionalization (CSGR), University of Warwick, h. 2-3.

⁵² Thomas Richard Davies (2008), h. 2.

penurunannya⁵³, dan masyarakat sipil transnasional itu sendiri di masa lalu dan di masa depan bisa berkontribusi terhadap kematiannya sendiri⁵⁴.

Richard Price dalam pemaparannya memeriksa bagaimana masyarakat sipil transnasional bekerja melalui jaringan isu untuk mengajar kepentingan negara dalam kebijakan keamanan. Price menganalisis kampanye masyarakat sipil transnasional untuk menghasilkan norma internasional yang melarang ranjau daratan tipersonil dan melacak efek dari beberapa teknik melalui

mana negara dapat dikatakan disosialisasikan. Melalui menghasilkan isu, jaringan, "sambungan" dan menggunakan metode Sokrates (yaitu dialog) transnasional untuk membalikkan beban pembuktian, kampanye telah mendorong perubahan normatif sistemik melalui dua proses: adopsi norma melalui konversi membujuk pengraju moral dan emulasi akibat tekanan sosial dari identitas⁵⁵.

Indonesia sebagai negara bangsa, terbentuk dari gerakan-gerakan subnasional, identitas dan budaya yang dilandasi oleh kolonialisme dan kekalahan Jepang pada Perang Dunia II. Sehingga yang terjadi di Indonesia adalah pluralitas dan heterogenitas serta nasionalisme ganda dimana ada identitas etnis dan sipil yang secara bersamaan melekat pada warganegara Indonesia, contohnya, Etnis Batak, Minang, Jawa, China, Melayu, India, Arab, dan sebagainya (etnis minoritas maupun mayoritas) yang tersebar dari sabang sampai merauke yang merupakan sipil (warganegara) Indonesia (misalnya: Saya Minang dan Saya Indonesia). Dengan demikian Indonesia menjadi negara bangsa

⁵³Komunikasi transnasional lebih cepat dan lebih murah daripada sebelumnya; globalisasi ekonomi terus berlanjut; dan masalah transnasional yang memerlukan solusi global telah menjadi semakin jelas. Selain itu, dekolonisasi tidak hanya memberikan kesempatan bagi masyarakat sipil transnasional untuk tersebar di seluruh dunia, demikian juga merangsang pembentukan asosiasi transnasional, organisasi di tingkat regional dan sebagainya. Perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi transnasional telah membawa orang-orang yang berbedak dalam kontak yang lebih dekat satu dengan yang lain, membuat mereka juga lebih menyadari perbedaan mereka. Dengan globalisasi –khususnya ekonomi dengan konsekuensi negatif bagi mereka yang tidak efektif bersaing dalam perekonomian dunia– telah menimbulkan reaksi nasionalis yang memiliki potensi yang cukup besar untuk melemahkan masyarakat sipil transnasional. Thomas Richard Davies (2008), *The Rise and Fall of Transnational Civil Society: The Evolution of International Non-Governmental Organizations Since 1839, Working Papers on Transnational Politics*, London: City University, Centre for International Politics, h. 13-15.

⁵⁴Thomas Richard Davies (2008), h. 16.

⁵⁵ Richard Price, *Reversing the Gun Sights: Transnational Civil Society Targets Land Mines*, International Organization, Volume 52 / Issue 03 / Summer 1998, pp 613-644.

modern dimana multi nasional, multi etnis dan heterogen terhadap budaya dan juga agama. Inilah kenapa Kymlicka tidak setuju dengan pandangan yang mengatakan bahwa semua penduduk di dalam sebuah negara harus memiliki identitas yang sama yang melekat pada setiap warganegara karna setiap individu membawa identitas etnis, agama, ataupun kelompoknya (misalnya kelompok difabel dan sebagainya) melainkan sebagai sebuah identitas yang otonom individu yang berbeda-beda sekaligus memiliki identitas sipil sebagai nasionalisme terhadap negara bangsanya. Jika mengacu pada pernyataan Mouffe bahwa tidak adanya identitas yang absolut dan final (*the unfixed of all identities*). Diskursifitas tentang identitas selalu berproses tanpa henti makanya banyak identitas baru yang akan muncul secara terbuka.

Melihat keberagaman Indonesia, memajukan demokrasi melalui inklusi atau demokrasi deliberatif adalah jawab dan persoalan sosial di masyarakat saat ini. Jika Mouffe menolak bila kewarganegaraan cuma 'satu identitas di antara banyak identitas' atau 'satu identitas yang dominan yang menekankan semua identitas lainnya, maka Kymlicka menekankan pada multikultural

warganegara dalam negara bangsa yang ingin diakui atas perbedaan bukan persamaan untuk perbedaan tersebut. Inilah kenapa dalam memajukan demokrasi di Indonesia sangat ditentukan oleh praktik dari inklusi sosial. Jika inklusi sosial masih menjadi persoalan, maka demokrasi di Indonesia masih menjadi persoalan bahkan di titik awalnya.

Salah satu dari perkembangan dan perubahan struktur global dunia yang bisa menjadi persoalan baru bagi Indonesia adalah akan diadakannya ASEAN Community (AC) atau Masyarakat ASEAN (MA) yang akan diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2015 atau 1 Januari 2016. Ini merupakan salah satu gerbang transnasional yang dihadapi oleh Indonesia kontemporer. Transnasionalisme merupakan tantangan dan peluang baru bagi perjalanan demokrasi Indonesia khususnya dalam memajukan masyarakat sipilnya. Transnasionalisme ini kemudian memberikan pengaruh yang besar terhadap perjalanan demokrasi di Indonesia, sehingga wacana demokrasi tidak lagi berbicara tentang *human being* tetapi *human right* dan salah satu faktor utama yang harus diperkuat dan diperhatikan adalah masyarakat sipil.

PENUTUP

Inklusi sosial harus dimaknai bahwa perlunya pengakuan atas perbedaan bukanlah persamaan atas perbedaan. Artinya hak minoritas maupun mayoritas harus sama-sama diakui sebagai hak universal *the citizen*. Terlaksananya inklusi sosial nantinya dengan sendirinya keadilan sosial akan segera terwujud. Sehingga jalan utama yang dipilih bangsa ini, Demokrasi Pancasila dapat kembali pada *khittah*-nya yakni kesejahteraan dan kedaulatan rakyat. Memajukan demokrasi Indonesia dari inklusi sosial sampai pada keadilan sosial adalah “sesat diujung kembali ke pangkal” artinya adalah jalan pulang untuk mencapai tujuan bernegara.

Indonesia sebagai negara modern, untuk menganalisisnya sebagai keseluruhan, setidaknya ada tiga komponen di dalamnya: negara/birokrasi (kekuasaan), pasar (uang), dan masyarakat (solidaritas). Ada dua unsur dalam bagan ini. Unsur atas adalah negara dan pasar. Ini yang disebut sistem; dan unsur bawah yaitu masyarakat. Ini yang disebut *lebenswelt*. Perbedaan itu bukan semata-mata terjadi karena perbedaan analisa, tetapi juga perbedaan bentuk komunikasi. Habermas melihat bahwa dalam masyarakat modern, tugas masyarakat sipil

adalah memperbesar *lebenswelt* dengan membangun kekuasaan komunikatif (*communicative power*), dengan menciptakan forum inisiatif warga. Kekuasaan komunikatif ini ada ketika ada kekuasaan jaringan, jaringan komunikasi yang tumbuh, baik di alam bidang sosial, budaya, dll. Masyarakat Indonesia punya potensi deliberatif yang tinggi yang dalam masyarakat tradisional ada pada apa yang disebut gotong-royong dan musyawarah. Dengan musyawarah yang bebas, non-diskriminatif, non-manipulatif, sebenarnya masyarakat sipil Indonesia telah memiliki ruang-ruang untuk deliberasi. Jadi tugas masyarakat sipil adalah menghidupkan dan memvitalisasi potensi itu menjadi suatu gerakan⁵⁶.

Tentu saja sesuai konteks kekinian gerakan itu tidak lagi terkungkung di tingkat lokal bahkan hanya nasional, namun juga internasional bahkan global melalui apa yang disebut dengan transnasionalisme tersebut. Itu dibutuhkan untuk mendorong adanya *political will* atau kemauan politik dari pemimpin negara ini apakah akan kembali pada amanat UUD 1945 dan Pancasila atau akan mencari jalan baru untuk memajukan demokrasi di Indonesia.

⁵⁶ F. Budi Hardiman, 2008.

Jalan baru tersebut mungkin tidak benar-benar baru, namun sebuah perpaduan antara kembali kepada amanat UUD 1945 dan Pancasila dengan semangat kemanusiaan universal yang kosmopolit dengan

menjungjung tinggi hak-hak asasi manusia melalui inklusi sosial dan keadilan sosial. Sehingga terwujudlah tatanan dunia yang demokratis secara sosial.

Daftar Pustaka

- Andreea Lazăr (2011), *Transnational Migration Studie,. Reframing Sociological*, Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology, Volume 2, Number 2, Fall 2011, ISSN 2068 – 0317.
- Ben Davis, 2007, *Advocacy NGOs, Transnationalism and Political Space, An Indonesian Case Study*, sebuah Tesis pada Department of Indonesian Studies, The University of Sydney.
- Boni Hargens, 2006, *Demokrasi Radikal: Memahami Paradox Demokrasi Modern Dalam Perspektif Postmarxis-Ostmodernis Ernesto Laclau Dan Chantal Moufee*. Yogyakarta: LKiS.
- Carol C. Gould. 1993. *Demokrasi Ditinjau Kembali*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Chantal Mouffe, 2000, *The Democratic Paradox*, New York dan London: Verso.
- James Anderson (2002), *Transnational Democracy, Political Spaces and*
- David Emanuel Gray. 2004. revised Agustust 2005. *Sosial Choice in Deliberative Democracy*, Tesis pada Carnegia Mellon University. Departemen of Philosophy,
- F. Budi Hardiman, 2008, *Demokrasi Deliberatif: Teori, Prinsip, dan Praktik*, Presentasi yang disampaikan dalam Forum Rapat Kerja ke-3 dan Koordinasi Pelaksanaan Deliberative Forum "Program Pemberdayaan Masyarakat Sipil dalam Proses Otonomi Daerah" di Wisma LPP, Yogyakarta, 24 Agustus 2005.
- Giddens, Anthony, 2002. *The Runaway World*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- International Organization for Migration (IOM), 2010, *Background Paper for International Dialogue On Migration*, Intersessional Workshop On Migration And Transnationalism: Opportunities And Challenges.
- Iris Marion Young. 2004. *Inclusion and Democracy*. Oxford: Oxford University Press.
- Border Crossings*, New York: Routledge.

- Jan Aart Scholte(1999), *Global Civil Society: Changing the World?* Coventry: Centre for the Study of Globalization and Regionalization (CSGR), University of Warwick.
- John Rawls, 1993. Political liberalism, New York : Columbia University Press, Lecture V
- Joseph Schumpeter. 1947. Capitalism, Socialism, And Democracy. New York: Harper and Brother.
- Jurgen Habermas. 1997. Between facts and Norms, terj. William Rehg. Inggris: Cambridge
- Kitab Amandemen UUD 1945
- Richard Price, *Reversing the Gun Sights: Transnational Civil Society Targets Land Mines*, International Organization, Volume 52 / Issue 03 / Summer 1998.
- Robert Dahl, *Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy vs Control*. Yale: Yale University Press.
- Steven Vertovec (2009), *Transnationalism*, New York: Routledge.
- Thomas Richard Davies (2008), *The Rise and Fall of Transnational Civil Society: The Evolution of International Non-Governmental Organizations Since 1839, Working Papers on Transnational Politics*, London: City University, Centre for International Politics.
- Vertovec, S. 2005, “*The political importance of diasporas*”, Centre on Migration, Policy and Society Working Paper No. 13, University of Oxford.
- Will Kymlicka, *Politics In The Vernacular: Nationalism, Multiculturalism and Citizenship*.
- Zulkifli Suleman. 2010. *Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran Politik Hatta*. Jakarta: Kompas Media.

PETUNJUK PENULISAN

1. Artikel harus orisinal dan belum pernah dimuat di media penerbitan lain atau sedang dipertimbangkan untuk dipublikasikan.
2. Tulisan ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
3. Jumlah kata 4000-5000 kata dengan format penulisan *Turabian Style*.
4. Sistematika Penulisan artikel adalah sebagai berikut:
 - a. Judul (spesifik dan efektif, maksimal 15 kata)
 - b. Nama Penulis
 - c. Abstrak dalam Bahasa Inggris (150-200 kata)
 - d. Kata-kata kunci (5 kata)
 - e. Pendahuluan
 - f. Metode Penelitian (untuk artikel hasil penelitian)
 - g. Hasil dan pembahasan
 - h. Kesimpulan dan Saran
 - i. Bibliografi
5. Berikut adalah contoh penulisan (*Turabian Style*) catatan kaki (**N**) dan sekaligus contoh penulisan pada bibliografi (**B**). Panduan ini berasal dari buku *A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations* ed. yang ditulis Kate L. Turabian.

Catatan: Pengutipan pada sumber berupa ide atau kutipan langsung harus muncul dalam catatan kaki dalam angka yang berurutan.

Pengutipan untuk pertama kalinya harus dilakukan secara penuh; nama (nama pertama lebih dulu), judul, tempat, penerbit, tahun dan nomor halaman atau bagian yang dikutip.

Pengutipan selanjutnya untuk karya yang sama bisa disingkat.

Buku

Dua Penulis

N 1. Kai Bird and Martin J. Sherwin, *American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer* (New York: Alfred A. Knopf, 2005), 52.

B Bird, Kai, and Martin J. Sherwin. *American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer*. New York: Alfred A. Knopf, 2005.

Bentuk Singkat dari Satu karya yang sebelumnya sudah pernah dikutip

Ketika satu karya yang dikutip telah dikutip sebelumnya dan langsung pada satu halaman berikutnya dikutip.

N 20. Philip Ball, *Bright Earth: Art and the Invention of Color* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2001), 140.

N 21. *Ibid.*, 145.

Jika karya yang dikutip sudah pernah dikutip sebelumnya, tapi tidak langsung pada satu halaman yang sama dan hanya satu karya dari penulis yang sama pernah dikutip

N 22. Ball, 204.

Jika dua atau lebih karya sudah pernah dikutip sebelumnya, gunakan tambahan judul singkat

N 23. Ball, *Bright Earth*, 204.

6. Naskah dialamatkan pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Gedung Jurusan – FISIP Universitas Andalas, Lt. 2 Kampus Limau Manis Padang, 25163 Telp/fax: (0751)71266,

Formulir berlangganan	
Andalas Journal of International Studies	
Mohon dicatat sebagai pelanggan Andalas Journal of International Studies	
Nama :	
Alamat :	
Telp/ HP :	
e-mail :	
Jumlah Berlanggan : eksamplar
Biaya berlangganan saya kirim lewat rekening a/n Bank no Rekening	

Biaya berlangganan 1 eksamplar atau 1 edisi terbit Rp35.000,-; sudah termasuk ongkos kirim

Andalas Journal of International Studies, is a journal for scholars, observers, and researchers in international studies in expressing ideas and thoughts related to the dynamic and issues of international relations. The dynamics of contemporary in international relations are increasingly complex. It demands the academic community to provide ideas that are more creative, brilliant and helpful for humanity. From these conditions, this journal comes to participate in scholarly discourse within the framework of strengthening the scientific community of international relations more solid and dynamic. Andalas Journal of International Studies to carry the ideals of unity not only in the frame of the mainstream, but is also present in the struggle optimism alternative ideas, like the spirit of crafting the alternatives from the corner of the community in the ideal arrangement for a better understanding in International Studies

ISSN 2301-8208

